

PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI PULAU SEBATIK TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL

Ferdinandus Bani¹, Ignecya Thithania Katoda², Marcos S. Y. Sanam³, Guido Tobhi Wage⁴, Yohanes Arman⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: fandidpores@gmail.com, inesskatoda@gmail.com, guidotobhiw@gmail.com, stefanjulio45@gmail.com, nanaarman54@gmail.com,

ABSTRAK

Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Pulau Sebatik, yang terbagi antara dua negara, menciptakan dinamika kompleks akibat ketegangan politik dan perbedaan kebijakan. Masyarakat di kedua sisi perbatasan sering memiliki hubungan kekeluargaan yang kuat, namun ketidakpastian hukum dan pembatasan mobilitas mengganggu interaksi sosial mereka. Keterbatasan infrastruktur dasar dan akses pendidikan yang buruk memperburuk kondisi ekonomi, meningkatkan ketergantungan masyarakat pada ekonomi di sisi Malaysia. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi pengaruh sengketa perbatasan terhadap masyarakat lokal serta mengidentifikasi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Diperlukan upaya penyelesaian yang melibatkan dialog, kearifan lokal, dan peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sebatik.

Kata kunci : Sengketa Perbatasan, ketidakpastian hukum, keterbatasan infrastruktur.

ABSTRACT

The border dispute between Indonesia and Malaysia on Sebatik Island has a significant impact on the social and economic life of the local community. Sebatik Island, which is divided between the two countries, creates complex dynamics due to political tensions and differences in policies. Communities on both sides of the border often have strong family ties, but legal uncertainty and mobility restrictions disrupt their social interactions. Limited basic infrastructure and poor access to education worsen economic conditions, increasing the community's dependence on the economy on the Malaysian side. This study uses a qualitative method with a case study approach to explore the impact of the border dispute on the local community and identify obstacles to infrastructure development. Efforts to resolve the dispute are needed, involving dialogue, local wisdom, and infrastructure improvements to improve the welfare of the community on Sebatik Island.

Keywords: Border Dispute, legal uncertainty, infrastructure limitations.

PENDAHULUAN

Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik merupakan salah satu isu penting yang mempengaruhi dinamika hubungan bilateral kedua negara serta berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat lokal. Pulau Sebatik yang terletak di pesisir timur Kalimantan di Laut Celebes, memiliki luas sekitar 452,2-kilometer persegi dan secara unik terbagi menjadi dua wilayah kedaulatan yang berbeda. Bagian utara pulau ini

berada di bawah kedaulatan Malaysia (Sabah), sementara bagian selatan merupakan wilayah Indonesia (Kalimantan Utara).

Pembagian wilayah ini memiliki akar historis yang dapat ditelusuri hingga era kolonial, khususnya melalui Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1891 yang menetapkan garis batas antara kedua wilayah. Namun, warisan kolonial ini telah menciptakan berbagai kompleksitas dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan kehidupan masyarakat yang mendiaminya. Berdasarkan data demografis terkini, populasi di sisi Indonesia Pulau Sebatik mencapai 47.571 jiwa pada tahun 2020, sementara sisi Malaysia dihuni oleh sekitar 25.000 penduduk. Keunikan geografis dan pembagian administratif Pulau Sebatik telah menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Masyarakat di kedua sisi perbatasan seringkali memiliki ikatan kekeluargaan dan tradisi budaya yang sama, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial mereka. Tidak adanya penghalang fisik yang ketat seperti kantor imigrasi atau bea cukai di sepanjang perbatasan, dengan batas wilayah yang hanya ditandai oleh tiang beton setiap kilometer dari timur ke barat, telah memungkinkan terjadinya pergerakan relatif bebas bagi penduduk dan barang. Sengketa perbatasan di Pulau Sebatik memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar persoalan teritorial. Pulau ini memiliki nilai strategis karena lokasinya yang berdekatan dengan blok laut Ambalat yang kaya akan cadangan minyak mentah, yang telah menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2005. Situasi ini telah mendorong kedua negara untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan, yang pada gilirannya mempengaruhi pola interaksi sosial masyarakat lokal.

Masyarakat Pulau Sebatik, yang terbagi oleh garis lintang 4°10'LU, menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan ketergantungan ekonomi pada Malaysia, memperparah kerentanan sosial. Kebijakan pemerintah terkait perbatasan di Pulau Sebatik seringkali tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak menyentuh kearifan lokal, sehingga menimbulkan respon negatif. Ini dapat menyebabkan frustrasi dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat Sebatik masih banyak yang bergantung pada ekonomi di Kota Tawau, Sabah, Malaysia, karena harga barang kebutuhan pokok di Indonesia lebih mahal. Hal ini dapat memperlemah ekonomi lokal dan meningkatkan risiko kerentanan sosial. Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan akses listrik, sangat

berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Pulau Sebatik. Infrastruktur yang buruk menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Menurut laporan dari World Bank, akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar di daerah perbatasan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kemiskinan.

Akses pendidikan yang terbatas dan fasilitas yang kurang memadai juga menjadi masalah utama di Pulau Sebatik. Akses pendidikan yang terbatas di Pulau Sebatik menjadi salah satu faktor krusial yang mempengaruhi perkembangan masyarakat lokal. Meskipun terdapat beberapa lembaga pendidikan, banyak dari sekolah-sekolah tersebut yang menghadapi keterbatasan fasilitas, termasuk kurangnya ruang kelas, buku ajar, dan tenaga pengajar yang berkualitas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di daerah perbatasan sering kali lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lebih maju, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak di Pulau Sebatik dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Akses pendidikan yang terbatas di Pulau Sebatik menjadi salah satu faktor krusial yang mempengaruhi perkembangan masyarakat lokal. Meskipun terdapat beberapa lembaga pendidikan, banyak dari sekolah-sekolah tersebut yang menghadapi keterbatasan fasilitas, termasuk kurangnya ruang kelas, buku ajar, dan tenaga pengajar yang berkualitas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di daerah perbatasan sering kali lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lebih maju, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak di Pulau Sebatik dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Keterbatasan akses pendidikan dan infrastruktur dasar menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Dengan pendidikan yang terbatas, generasi muda tidak dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja, mengakibatkan ketergantungan pada pekerjaan yang kurang produktif. Data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di daerah perbatasan, termasuk Pulau Sebatik, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Lebih jauh lagi, infrastruktur yang buruk juga menghambat investasi dari luar, yang penting untuk pengembangan ekonomi lokal. Tanpa adanya investasi, peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas

hidup masyarakat akan terbatas. Sebuah laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar adalah kunci untuk meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi.

METODE PENELITIAN

Artikel jurnal ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang studi kasus terperinci mengenai perbatasan Indonesia Malaysia di pulau Sebatik terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, laporan media, dan dokumen resmi yang terkait dengan kasus ini.

PEMBAHASAN

Bagaimana sengketa perbatasan Pulau Sebatik memengaruhi hubungan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik tidak hanya memengaruhi aspek politik dan jalur diplomasi kedua negara, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Pulau Sebatik, yang terletak di perbatasan kedua negara, memiliki karakteristik unik sebagai wilayah yang terbagi antara dua negara dengan budaya dan tradisi yang serupa. Dinamika sengketa ini telah menciptakan tantangan dan peluang yang kompleks bagi masyarakat yang tinggal di pulau tersebut. Masyarakat Pulau Sebatik memiliki keterikatan budaya dan kekerabatan yang kuat, di mana banyak keluarga memiliki anggota di kedua sisi perbatasan. Namun, sengketa perbatasan telah menciptakan ketegangan yang mempengaruhi hubungan antarwarga. Ketidakpastian status hukum dan peraturan yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia sering kali membuat warga merasa terasing dari satu sama lain, meskipun mereka memiliki ikatan keluarga yang kuat. Sebuah studi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki anggota di kedua sisi

perbatasan sering menghadapi dilema dalam mempertahankan hubungan, terutama ketika ada peraturan yang membatasi mobilitas mereka. Keterbatasan ini tidak hanya memengaruhi interaksi sosial, tetapi juga mengurangi partisipasi dalam acara budaya atau perayaan yang melibatkan anggota keluarga dari kedua sisi, sehingga mengurangi rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Sengketa perbatasan juga dapat memicu ketegangan sosial antara masyarakat di kedua sisi. Perbedaan kebijakan pemerintah, peraturan, dan pengawasan yang ketat sering kali menimbulkan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Mereka yang merasa bahwa hak dan kebebasan mereka dibatasi dapat mengembangkan sikap negatif terhadap pemerintah dan warga negara tetangga. Ketegangan ini dapat berujung pada konflik sosial yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.

Sengketa perbatasan secara langsung mempengaruhi aktivitas ekonomi dan perdagangan di Pulau Sebatik. Banyak masyarakat yang bergantung pada perdagangan lintas batas, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Namun, dengan adanya ketegangan politik dan pembatasan di perbatasan, banyak kegiatan ekonomi yang terhambat. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) menunjukkan bahwa para pedagang di Pulau Sebatik mengalami penurunan pendapatan hingga 40% akibat pembatasan perdagangan lintas batas (LPEM-FEB UI, 2022). Hal ini tidak hanya mempengaruhi pedagang besar, tetapi juga berdampak pada petani dan pengusaha kecil yang sering bergantung pada penjualan produk mereka ke sisi Malaysia. Dengan terbatasnya akses pasar, pendapatan masyarakat menurun, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sengketa perbatasan juga menciptakan ketidakpastian ekonomi di kalangan masyarakat. Ketidakpastian mengenai status wilayah dan kebijakan pemerintah membuat banyak investor ragu untuk berinvestasi di Pulau Sebatik. Sengketa perbatasan dapat menyebabkan perubahan dalam struktur ekonomi di Pulau Sebatik. Ketika perdagangan lintas batas terganggu, masyarakat mungkin beralih ke aktivitas ekonomi lain yang lebih lokal, seperti pertanian subsisten atau usaha kecil. Meskipun ini bisa menjadi solusi jangka pendek, bergantung pada ekonomi lokal yang kurang berkembang dapat membatasi potensi pertumbuhan jangka panjang. Perubahan ini juga dapat berdampak pada ketahanan pangan dan akses terhadap barang-barang

kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan dalam akses pasar internasional dapat menyebabkan harga barang meningkat, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebuah laporan dari Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa fluktuasi harga akibat ketidakstabilan ekonomi di daerah perbatasan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Apa kendala utama dalam pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Sebatik.

Pulau Sebatik, yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Namun, kendala utama dalam pembangunan infrastruktur dasar menjadi tantangan signifikan yang menghambat kemajuan wilayah tersebut. Infrastruktur dasar, yang mencakup jalan, jembatan, akses listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Sebatik serta dampaknya terhadap masyarakat lokal.

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Sebatik adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Sebagai daerah perbatasan, Pulau Sebatik sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah pusat dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sering kali terbatas, sehingga proyek-proyek penting dapat terhambat atau bahkan dibatalkan. Menurut laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), daerah perbatasan sering kali menjadi prioritas terakhir dalam penganggaran pembangunan infrastruktur. Hal ini menyebabkan proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan tertunda, dan masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas dasar yang mereka butuhkan (Bappenas, 2021). Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis juga menjadi masalah, di mana kurangnya tenaga kerja terlatih dapat menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur secara efektif.

2. Tantangan Geografis dan Lingkungan

Kendala geografis juga memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Sebatik. Pulau ini memiliki medan yang sulit, dengan daerah hutan yang lebat dan lahan yang berbukit. Kondisi ini membuat pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan menjadi lebih kompleks dan mahal. Kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti hujan lebat dan angin kencang, sering kali memperburuk situasi. Proyek infrastruktur dapat terhambat atau mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem, yang pada gilirannya menambah biaya perawatan dan pembangunan. Menurut penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), kesulitan dalam menjangkau lokasi proyek infrastruktur di daerah terpencil di Pulau Sebatik menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek.

3. Kurangnya Koordinasi Antara Stakeholder

Koordinasi antara berbagai stakeholder juga menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Sebatik. Terdapat banyak pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta. Namun, seringkali terdapat kurangnya sinergi antara pihak-pihak ini, yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Misalnya, pemerintah daerah mungkin memiliki prioritas yang berbeda dibandingkan dengan rencana pembangunan nasional. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan proyek yang dianggap penting oleh masyarakat setempat tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah pusat. Sebuah laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan tumpang tindih dalam proyek dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

4. Masalah Hukum dan Kebijakan

Kendala hukum dan kebijakan juga berkontribusi pada lambatnya pembangunan infrastruktur di Pulau Sebatik. Proses perizinan yang rumit dan panjang sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Masyarakat sering kali merasa frustrasi dengan birokrasi yang berbelit-belit, yang dapat menghambat proses pengajuan izin dan pelaksanaan proyek. Peraturan yang

tidak konsisten antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi masalah. Kadang-kadang, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal karena adanya peraturan daerah yang berbeda. Hal ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian bagi para kontraktor dan pengembang yang berusaha untuk melaksanakan proyek infrastruktur.

5. Pendanaan Swasta yang Terbatas

Di samping anggaran pemerintah yang terbatas, pendanaan dari sektor swasta juga mengalami kesulitan. Masyarakat dan investor swasta mungkin ragu untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur di Pulau Sebatik karena ketidakpastian politik dan ekonomi. Banyak investor mencari peluang di tempat lain yang dianggap lebih stabil dan menguntungkan. Kurangnya insentif dari pemerintah untuk menarik investasi juga menjadi kendala. Tanpa adanya dukungan dari sektor swasta, pembangunan infrastruktur dasar akan bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah, yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang mendesak.

6. Dampak Sosial dan Ekonomi

Kendala-kendala yang telah disebutkan di atas berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat di Pulau Sebatik. Keterbatasan infrastruktur dasar mengakibatkan akses yang buruk terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Masyarakat sering kali harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan, yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dari segi ekonomi, kurangnya infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan usaha lokal. Para pengusaha kecil dan petani yang ingin memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas sering kali menghadapi kendala dalam transportasi dan aksesibilitas. Hal ini dapat mengurangi pendapatan mereka dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Bagaimana upaya penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik dapat dioptimalkan agar sesuai dengan kearifan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut

Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik merupakan isu yang kompleks, melibatkan berbagai aspek politik, sosial, dan ekonomi. Dengan batas wilayah yang tidak selalu jelas dan latar belakang historis yang panjang, penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap kearifan lokal. Dalam konteks ini, pengoptimalan upaya penyelesaian sengketa tidak hanya akan membantu mengurangi ketegangan antara kedua negara, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Pembahasan ini akan menguraikan berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Mengedepankan Dialog dan Diplomasi

Salah satu langkah awal yang perlu diambil dalam penyelesaian sengketa perbatasan adalah membangun forum dialog yang melibatkan pihak-pihak terkait di tingkat lokal, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan perwakilan dari kedua negara. Forum ini dapat berfungsi sebagai platform untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan perbatasan, termasuk hak-hak masyarakat lokal, akses terhadap sumber daya, dan kepentingan ekonomi. Dengan melibatkan masyarakat dalam dialog, pihak-pihak terkait dapat lebih memahami perspektif dan kebutuhan mereka. Hal ini akan membantu dalam merumuskan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menurut penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi potensi konflik. Selain dialog lokal, penting untuk menerapkan diplomasi bilateral yang sensitif terhadap budaya. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu melakukan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan sengketa, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di Pulau Sebatik. Kerjasama dalam hal pertukaran budaya, pendidikan, dan kegiatan sosial dapat membantu membangun rasa saling pengertian dan mengurangi ketegangan.

2. Pendekatan Kearifan Lokal

Kearifan lokal di Pulau Sebatik, yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat setempat, harus diintegrasikan dalam kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian

sengketa. Misalnya, pemetaan batas wilayah yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dapat membantu memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Ini juga dapat membantu mengurangi potensi konflik, karena masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam dan pengelolaan wilayah juga sangat penting. Masyarakat harus diberikan ruang untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, dengan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan akses ke teknologi. Dengan cara ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan sumber daya dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Lokal

Pembangunan infrastruktur yang baik di wilayah perbatasan dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses listrik akan mempermudah mobilitas penduduk dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Hal ini akan menciptakan peluang ekonomi baru, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mendorong ekonomi berbasis komunitas juga merupakan langkah penting dalam penyelesaian sengketa. Pemerintah dapat mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang melibatkan masyarakat setempat. Misalnya, program pelatihan keterampilan dan akses ke permodalan dapat membantu masyarakat untuk memulai usaha dan meningkatkan pendapatan mereka. Ini juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor informal dan meningkatkan ketahanan ekonomi mereka.

4. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat

Penegakan hukum yang adil dan transparan di wilayah perbatasan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi. Pemerintah harus menjamin bahwa hukum yang berlaku di kedua negara diimplementasikan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Hal ini termasuk perlindungan terhadap hak atas tanah, sumber daya alam, dan akses terhadap layanan publik. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal

memiliki mekanisme penyelesaian sengketa secara adat. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat sengketa perbatasan. Dengan menghormati dan memanfaatkan mekanisme adat ini, pemerintah dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan solusi yang lebih harmonis. Penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat sering kali lebih berhasil karena melibatkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati.

5. Evaluasi dan Monitoring

Penting untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi kebijakan yang telah diambil. Pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa perbatasan berfungsi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Sengketa perbatasan Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia berdampak signifikan pada hubungan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Ketidakjelasan batas wilayah menyebabkan ketegangan sosial, membatasi mobilitas dan interaksi antarwarga yang memiliki ikatan keluarga di dua sisi perbatasan. Secara ekonomi, ketergantungan masyarakat pada Malaysia meningkat karena pembatasan perdagangan dan infrastruktur yang kurang memadai di sisi Indonesia, sehingga pendapatan masyarakat menurun dan kesejahteraan terancam. Pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Sebatik terkendala oleh keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit, kurangnya koordinasi antar stakeholder, masalah hukum dan kebijakan, serta minimnya pendanaan swasta. Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi menjadi terbatas, memperburuk kondisi sosial ekonomi di wilayah perbatasan.

SARAN

1. Mengedepankan dialog dan diplomasi bilateral yang inklusif, melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah dari kedua negara untuk mencari solusi yang menghormati kearifan lokal dan nilai budaya setempat serta mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemetaan batas wilayah secara partisipatif.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas publik untuk memperbaiki aksesibilitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal dan juga mendorong pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas, dengan pelatihan keterampilan dan akses permodalan untuk UKM, sehingga mengurangi ketergantungan pada ekonomi lintas batas yang rentan.
3. Menegakkan hukum secara adil dan transparan, serta memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa adat untuk mengurangi konflik dan membangun harmoni sosial. Dan juga melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap kebijakan dan program yang dijalankan agar responsif terhadap dinamika di lapangan dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, F. N., & Adi, D. P. (2025). Analisis Penyebab Berlarutnya Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik dalam Prespektif Hukum Internasional.
- Permana, T. Z., & Senia, V. (2023). Pengaruh Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (2024). Mendagri Ungkap RI-Malaysia Segera Teken MoU dari 3 Wilayah Sengketa Batas Negara.
- Universitas Gadjah Mada (UGM). (2024). Sengketa Batas antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik.
- Sahala Fransiskus Marbun, Popy Ardian Ningsih Zega, Aisyah Nur Aini, Roma Ulina Sihotang, Rio Anggoro. (2025). Analisis Penyebab Berlarutnya Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik dalam Perspektif Hukum Internasional.
- Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM-FEB UI). (2022). Studi Dampak Sengketa Perbatasan terhadap Pendapatan Pedagang di Pulau Sebatik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2021). Evaluasi Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan.

Maulida, (2021). Diplomasi Indonesia Terhadap Malaysia dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Darat Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik.

Arman, Y. (2023). Dampak perubahan titik batas di Pulau Sebatik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif prinsip Uti Possidentis